

Polii Einjelheart Hansiden



# GOVERNANSI DIGITAL

**PARADIGMA BARU  
ADMINISTRASI PUBLIK**

Editor: Intama Jemy Polii

# GOVERNANSI DIGITAL

## PARADIGMA BARU ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis mengajak pembaca dalam petualangan ilmiah melalui zaman, menyusuri evolusi paradigma administrasi publik dari klasik hingga kontemporer, dan menerobos ke dunia digital yang penuh gejolak. Dengan pemaparan yang mendetail, pembaca tidak hanya akan memahami esensi prinsip-prinsip administrasi klasik yang masih relevan, tetapi juga merasakan getaran revolusi teknologi digital yang mengubah wajah pemerintahan. Bagian kedua membawa kita menggali sejarah dan dampak teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memberikan wawasan mendalam tentang implementasinya di berbagai negara. Dalam bagian ketiga, pembaca diajak merenung tentang masa depan governansi digital, menjelajahi konsep kota pintar, kepemimpinan digital, dan dilema pengambilan keputusan antara manusia dan kecerdasan buatan. Buku ini tidak hanya menjadi panduan komprehensif bagi mahasiswa dan praktisi administrasi publik, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenung tentang bagaimana teknologi membentuk arah pemerintahan masa depan.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekaediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# GOVERNANSI DIGITAL: PARADIGMA BARU ADMINISTRASI PUBLIK

Polii Einjelheart Hansiden



**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**GOVERNANSI DIGITAL: PARADIGMA BARU  
ADMINISTRASI PUBLIK**

**Penulis** : Polii Einjelheart Hansiden

**Editor** : Intama Jemy Polii

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Rizki Rose Mardiana

**ISBN** : 978-623-151-922-1

**No. HKI** : EC002023125607

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Selamat datang, saya ingin mengajak Anda untuk menjelajahi dunia yang terus berubah dari governansi digital. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, administrasi publik telah mengalami transformasi yang signifikan. Paradigma lama digantikan oleh model baru yang mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat.

Buku ini membawa Anda melalui perjalanan dari paradigma klasik hingga era pemerintahan digital yang inovatif. Kami akan membahas evolusi administrasi publik, menguraikan konsep-konsep kunci, dan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi telah memengaruhi cara pemerintah berinteraksi dengan warga negara, bisnis, dan sesama lembaga pemerintah.

Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang relevan, disertai dengan studi kasus dan penelitian terkini untuk mendukung konsep-konsep yang dijelaskan. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber daya berharga bagi para akademisi, praktisi pemerintahan, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami peran kunci teknologi dalam membentuk masa depan administrasi publik.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, termasuk para ahli, peneliti, dan praktisi yang telah berbagi pengetahuan dan wawasannya serta penerbit yang sudah mau menerbitkan buku ini. Semoga buku ini memberikan pandangan yang jelas dan bermanfaat dalam memahami governansi digital dan perannya dalam meningkatkan pelayanan publik.

Hormat kami,

Polii Einjelheart Hansiden

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PART 1: PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1 PARADIGMA KLASIK .....</b>	<b>5</b>
A. Definisi dan Karakteristik Paradigma Klasik dalam Administrasi Publik.....	9
B. Teori-teori Administrasi Publik Klasik.....	11
C. Relevansi Paradigma Klasik dalam Konteks Administrasi Publik Modern.....	19
D. Prinsip-Prinsip Paradigma Klasik dalam Mengelola Pemerintahan Masa Kini .....	26
<b>BAB 2 PARADIGMA NEO KLASIK.....</b>	<b>29</b>
A. Definisi Paradigma Neo Klasik .....	30
B. Pengenalan Paradigma Neo Klasik dan Perbedaannya dengan Klasik .....	38
C. Teori Administrasi Publik Neo Klasik .....	41
<b>BAB 3 PARADIGMA KONTEMPORER.....</b>	<b>47</b>
A. Karakteristik Paradigma Kontemporer dalam Administrasi Publik.....	47
B. Teori dan Pendekatan Terkini dalam Administrasi Publik.....	49
C. Evaluasi dan Kritik terhadap Paradigma Kontemporer .....	54
<b>PART 2: DIGITALISASI ADMINISTRASI PUBLIK.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB 4 SEJARAH DAN KONSEP TIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP ILMU PENGETAHUAN .....</b>	<b>58</b>
A. Revolusi Industri .....	58
B. Perkembangan Teknologi Digital.....	71
C. Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Tata Kelola Organisasi dan Pemerintahan.....	83
D. Teknologi Digital di Indonesia .....	89
E. Penerapan Teknologi Digital di Pemerintahan Amerika Serikat .....	96
F. Pelayanan Publik Digital.....	113

<b>BAB 5</b>	<b>PERKEMBANGAN KONSEP E-GOVERNMENT DAN E-GOVERNANCE.....</b>	<b>120</b>
	A. Sejarah Perkembangan.....	120
	B. Kasus-kasus Studi E-Government Sukses.....	123
	C. Kunci Sukses dalam Implementasi E-Government .....	127
<b>BAB 6</b>	<b>KONSEP GOVERNANSI DIGITAL DAN KOMPONENNYA.....</b>	<b>130</b>
	A. Konsep Dasar.....	132
	B. Definisi .....	133
	C. Prinsip-prinsip.....	141
	D. Elemen Penting yang Perlu Dipahami .....	145
	E. Teori dan Kerangka Governansi Digital .....	161
<b>BAB 7</b>	<b>PEMERINTAHAN ERA DIGITAL .....</b>	<b>169</b>
	A. Paradigma Teknologi Pemerintahan.....	170
	B. Teori Pemerintahan Digital .....	191
	C. Model Governansi Digital Gil-Garcia.....	199
<b>PART 3:</b>	<b>MASA DEPAN GOVERNANSI DIGITAL.....</b>	<b>201</b>
<b>BAB 8</b>	<b>TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK .....</b>	<b>202</b>
	A. Kota Pintar ( <i>Smart Cities</i> ) .....	204
	B. Kepemimpinan Digital ( <i>Digital Leadership</i> ) .....	210
	C. Pengambilan Keputusan Manusia vs Artificial Intelligence ( <i>Decision Making Human vs AI</i> ) .....	218
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>228</b>
<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>.....</b>	<b>236</b>



**GOVERNANSI DIGITAL: PARADIGMA BARU  
ADMINISTRASI PUBLIK**

**Polii Einjelheart Hansiden**







**PART 1: PARADIGMA ADMINISTRASI  
PUBLIK**



# BAB

# 1

# PARADIGMA KLASIK

## **Pendahuluan**

Pada awalnya, administrasi publik dianggap sebagai suatu bidang pengetahuan murni yang berdiri di luar masalah politik. Woodrow Wilson, pada tahun 1887, mengemukakan bahwa pertanyaan administrasi bukanlah pertanyaan politik; meskipun politik menetapkan tugas untuk administrasi, politik tidak boleh memanipulasi kantor-kantor administrasi (Wilson, 1887).

Namun, pada tahun 1926, Leonard White mengajukan pandangan yang berbeda, menyatakan bahwa administrasi publik efektif hanya jika diintegrasikan antara ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi. Dikotomi antara kedua bidang ilmu tersebut mendorong penelitian lebih lanjut, yang menghasilkan pemahaman bahwa administrasi publik memiliki karakteristik universal yang dapat diimplementasikan di semua tatanan administrasi, asalkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya diterapkan.

Prinsip-prinsip administrasi publik pertama kali dikemukakan oleh Willoughby pada tahun 1927, diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Henry Fayol, Mary Parker Follet, Luther Gulick, dan Lyndall Urwick yang dikenal dengan prinsip-prinsip POSDCORB. Eksistensi administrasi publik pada era ini dijelaskan sebagai studi tentang bagaimana berbagai lembaga pemerintahan diorganisir, diberi staf, dimotivasi, dan dikelola (Litchfield, 1956).

Pandangan bahwa administrasi membuat kebijakan dan memiliki peran politik secara aktif juga muncul, dengan Dimock, Dimock, and Koenig (1960) menyatakan bahwa administrasi terlibat

# BAB

# 2

# PARADIGMA NEO KLASIK

## Pendahuluan

Paradigma Neo Klasik muncul sebagai respons terhadap evolusi dan kompleksitas yang terus berkembang dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi pada abad ke-20. Paradigma ini mengintegrasikan elemen-elemen dari paradigma klasik sambil mengakui kebutuhan untuk penyesuaian dan inovasi dalam menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Untuk memahami sejarah munculnya Paradigma Neo Klasik, kita dapat merinci beberapa faktor dan konteks historis yang mempengaruhinya:

- ❖ **Perkembangan Teori Organisasi Klasik:** Paradigma Neo Klasik merupakan pengembangan dari paradigma klasik yang mencakup kontribusi-kontribusi dari para ahli seperti Frederick W. Taylor, Henri Fayol, dan Max Weber. Meskipun paradigma klasik memberikan fondasi yang kuat untuk pemahaman manajemen, kebutuhan untuk mengakomodasi dinamika lingkungan yang semakin kompleks mulai menjadi jelas.
- ❖ **Perubahan Lingkungan Eksternal:** Pada paruh kedua abad ke-20, dunia mengalami transformasi signifikan baik dalam hal kemajuan teknologi maupun perubahan sosial dan ekonomi. Revolusi industri, globalisasi, dan percepatan kemajuan teknologi menjadi pendorong utama perubahan dalam cara organisasi beroperasi dan beradaptasi.
- ❖ **Kritik terhadap Keterbatasan Paradigma Klasik:** Keterbatasan paradigma klasik mulai menjadi jelas ketika organisasi

# BAB

# 3

# PARADIGMA KONTEMPORER

## **Pendahuluan**

Paradigma Kontemporer menghadirkan dinamika baru dalam administrasi publik, berkonfrontasi dengan tantangan kompleks, dan mengejar tujuan-tujuan yang lebih ambisius. Dalam bab ini, kita akan memasuki era administrasi publik yang mengintegrasikan berbagai teori dan pendekatan terkini untuk mencapai pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.

## **Karakteristik Paradigma Kontemporer dalam Administrasi Publik**

Paradigma Kontemporer ditandai oleh kecenderungan untuk menggabungkan elemen-elemen dari paradigma sebelumnya dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap inovasi. Fleksibilitas, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi pijakan utama dari pendekatan ini. Administrasi publik modern tidak hanya bertumpu pada prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga mengakui kebutuhan untuk menjawab kompleksitas dinamika sosial dan teknologi.

### **A. Karakteristik Paradigma Kontemporer dalam Administrasi Publik**

Paradigma Kontemporer dalam administrasi publik menunjukkan ciri-ciri khas yang menggambarkan arah baru dalam pendekatan manajemen dan pelaksanaan kebijakan. Beberapa karakteristik utama dari paradigma ini mencakup:



**PART 2: DIGITALISASI ADMINISTRASI  
PUBLIK**



# BAB 4

## SEJARAH DAN KONSEP TIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP ILMU PENGETAHUAN

### A. Revolusi Industri

Sebelum mempelajari Perkembangan (Sejarah) Teknologi Digital kita wajib mengetahui Apa itu Revolusi Industri dan Perkembangannya. Revolusi Industri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan besar dalam produksi barang dan jasa, yang disebabkan oleh inovasi teknologi dalam waktu yang relatif singkat. Berikut adalah definisi Revolusi Industri menurut beberapa ahli:

1. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom asal Jerman, mendefinisikan Revolusi Industri sebagai "perubahan dalam cara-cara produksi, yang memicu perubahan dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik (Heller, 2011).
2. Arnold Toynbee, sejarawan dan filsuf asal Inggris, menjelaskan Revolusi Industri sebagai "perubahan dalam metode produksi yang memicu perubahan besar dalam organisasi sosial dan politik, serta pengaruhnya pada peradaban manusia."
3. Eric Hobsbawm, sejarawan asal Inggris, menjelaskan Revolusi Industri sebagai "perubahan besar dalam produksi industri, yang dipicu oleh penemuan mesin-mesin baru, dan memicu perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan hidup."

# BAB

# 5

## PERKEMBANGAN KONSEP E-GOVERNMENT DAN E- GOVERNANCE

### A. Sejarah Perkembangan

**Sejarah E-Government:** E-Government, atau pemerintahan elektronik, memiliki akar sejarah yang dapat ditelusuri kembali ke perkembangan teknologi informasi pada akhir abad ke-20. Awalnya, fokus E-Government adalah pada penyediaan layanan publik melalui platform online, seperti pembayaran pajak dan pendaftaran kendaraan. Seiring waktu, evolusi ini membawa konsep-konsep seperti pemerintahan terbuka dan partisipatif.

Salah satu ahli E-government ialah Dr. Albert Meijer, seorang profesor di Utrecht University, telah melakukan penelitian mendalam tentang evolusi E-Government dan dampaknya pada pemerintahan terbuka.

**Sejarah E-Governance:** E-Governance, atau tata kelola elektronik, berkembang sebagai tanggapan terhadap kompleksitas yang muncul seiring dengan penerapan teknologi informasi dalam administrasi publik. Konsep ini lebih terfokus pada aspek tata kelola, termasuk interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. E-Governance mengeksplorasi cara teknologi informasi dapat mengubah cara pengambilan keputusan dan kolaborasi di dalam dan di luar lingkungan pemerintahan.

Para ahli E-governance ialah Profesor dan peneliti seperti Dr. Adegboyega Ojo, yang terlibat dalam studi mengenai tata kelola elektronik dan pengaruhnya pada keterlibatan masyarakat.

# BAB 6

## KONSEP GOVERNANSI DIGITAL DAN KOMPONENNYA

Administrasi Publik merupakan ilmu pengetahuan dan seni dalam mengatur serta mengelola organisasi, sumber daya, serta teknologi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Seiring dengan perubahan sosial, lingkungan, dan teknologi yang terus berkembang, teori Administrasi Publik terus mengalami evolusi dan pengembangan. Salah satu evolusi terkini dalam ilmu ini adalah governansi digital, suatu paradigma baru yang membahas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta pemanfaatan data dan informasi digital untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik. Era governansi digital menjadi tambahan penting dalam perkembangan ilmu Administrasi Publik yang sebelumnya telah melalui Era Klasik, Era Neo Klasik, dan Era Kontemporer.



# BAB

# 7

# PEMERINTAHAN ERA DIGITAL

Pada era di mana teknologi semakin meresap ke dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemerintahan, pemahaman mendalam terhadap paradigma dan teori yang membentuk landasan governansi digital menjadi semakin krusial. Bab ini mengajak pembaca untuk menjelajahi beberapa kerangka teoritis utama yang memberikan pandangan holistik terhadap transformasi digital dalam administrasi publik.

## **Paradigma Teknologi Pemerintahan**

Paradigma Teknologi Pemerintahan menghadirkan perspektif yang mendalam terkait dengan penggunaan teknologi dalam konteks administrasi publik. Bab ini akan membahas Teori Aktor Jaringan (Actor-Network Theory/ANT), yang memberikan pemahaman tentang bagaimana jaringan interaksi antara berbagai elemen, termasuk manusia dan teknologi, membentuk dinamika dalam lingkungan pemerintahan digital.

## **Teori Pemerintahan Digital**

Teori Pemerintahan Digital membawa fokus pada perubahan esensial dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya dan mengelola sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks ini, Teori Sistem Sosial Teknis (Social-Technical Systems Theory/STST) menjadi sorotan, membahas kompleksitas hubungan antara aspek teknis dan sosial dalam lingkungan pemerintahan digital.



**PART 3: MASA DEPAN GOVERNANSI  
DIGITAL**



# BAB 8

## TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

### **Pendahuluan**

#### **Kota Pintar (*Smart City*).**

Kota Pintar, juga dikenal sebagai Smart City, Kepemimpinan Digital, dan Pengambilan Keputusan Manusia vs AI adalah tiga aspek integral dalam transformasi digital administrasi publik. Bab ini membahas bagaimana visi futuristik mengenai penggunaan teknologi dapat mengubah kota-kota menjadi lingkungan yang terhubung, kepemimpinan yang efektif dalam era digital, dan perbandingan antara kemampuan manusia dan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan.

#### **Konsep dan Ciri-ciri Kota Pintar (*Smart City*)**

Kota Pintar bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memahami kebutuhan warganya. Ini melibatkan penggunaan data dan teknologi untuk meningkatkan mobilitas, efisiensi energi, keamanan, dan keterlibatan masyarakat (Hollands, 2020). Dengan merinci ciri-ciri khas Kota Pintar, bab ini mengeksplorasi bagaimana integrasi teknologi dapat memberikan dampak positif bagi kualitas hidup dan layanan publik.

#### **Teknologi Kunci dalam Membangun Kota Pintar**

Di balik setiap Kota Pintar terdapat teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), Big Data, dan kecerdasan buatan (Caragliu et al., 2023). Bab ini menyajikan tulang punggung infrastruktur Kota Pintar, memaparkan cara teknologi ini memungkinkan integrasi dan pengelolaan data secara efisien untuk mencapai tujuan kota yang terhubung dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Altman, M., & McDonald, M. P. (2014). *HOW INDEPENDENT COMMISSIONS COULD USE THE INTERNET AND OPEN SOFTWARE TO MAXIMIZE TRANSPARENCY AND PUBLIC ENGAGEMENT IN REDISTRICTING*.  
[www.scholarsstrategynetwork.org](http://www.scholarsstrategynetwork.org)
- Ardern, J. (2018). Engaging with an uncertain world. *New Zealand International Review*, 43(3), 5–7.  
<https://www.jstor.org/stable/48552094>
- Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. *Communication Research*, 3(1), 3–21.
- Bank, W. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. The World Bank.
- Barnard, C. I. (1968). *The functions of the executive* (Vol. 11). Harvard university press.
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. University of Michigan press.
- Bevir, M. (2010). *Democratic governance*. Princeton University Press.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. WW Norton & Company.
- Business Review, H. (2022). Insights You Need from Harvard Business Review. In *Coronavirus and Business: The Insights You Need from Harvard Business Review*.
- Caragliu, A., Del Bo, C. F., & Nijkamp, P. (2023). "Smart Cities in Europe" Revisited: A Meta-Analysis of Smart City Economic Impacts. *Journal of Urban Technology*, 1–19.
- Carr, N. (2020). *The shallows: What the Internet is doing to our brains*. WW Norton & Company.
- Castells, M. (2009). The Rise of the network society Volume 1 With a new preface. *Book The Rise of the Network Society, Volume 1, With a New Preface*.

- Cayer, N. J. (2018). Public personnel and labor relations. In *Handbook of Public Administration* (pp. 345–379). Routledge.
- Cebula, J. L., & Young, L. R. (2010). *A taxonomy of operational cyber security risks*. Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh Pa Software Engineering Inst.
- Chiappone, L. L. (2014). Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace. Pierre Levy (translated from the French by Robert Bononno). New York: Plenum Trade, 1997. pp. xxviii, 277. In *Educational Studies* (pp. 44–47). Routledge.
- COSO. (2017). Enterprise Risk Management. Integrating with strategy and performance. In *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Vol. II* (Issue June).
- De Haes, S., Van Grembergen, W., De Haes, S., & Van Grembergen, W. (2015). *Enterprise governance of IT*. Springer.
- Denham, E. (2013). *Evaluating the Government of British Columbia's Open Government Initiative*. Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia.
- Dictionary, O. E. (1989). Oxford english dictionary. *Simpson, Ja & Weiner, Esc, 3*.
- Dimock, M. E., Dimock, G. O., & Koenig, L. W. (1960). *Public administration, revised edition*. New York: Reinhart and Company, Inc.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2015). *Design principles for essentially digital governance*.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Tinkler, J., & Bastow, S. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Dwight Waldo. (1955). "The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration." The Ronald Press Company.

- Etzioni, A. (2011). Cybersecurity in the private sector. *Issues in Science and Technology*, 28(1), 58–62.
- Fayol, H. (1919). *General principles of management*.
- Ferdinand, J., & Benham, R. (2017). *The cyber security ecosystem: defining a taxonomy of existing, emerging and future cyber threats*.
- Floridi, L., & Sanders, J. W. (2004). On the morality of artificial agents. *Minds and Machines*, 14, 349–379.
- Follett, M. P. (1977). *Dynamic administration: the collected papers of Mary Parker Follett*. Buccaneer Books.
- Ford, H. (2019). *Today and Tomorrow: Commemorative Edition of Ford's 1926 Classic*. Routledge.
- Fountain, J. E. (2004). *Building the virtual state: Information technology and institutional change*. Brookings institution press.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass Inc. Publishers.
- Friedrichs, R. W. (1970). Epistemological foundations for a sociological ethic. *The American Sociologist*, 138–140.
- Gilbreth, F. B., & Gilbreth, L. M. (1920). *Motion study for the handicapped*. G. Routledge & sons, Limited.
- Gil-Garcia, J. R. (2012). Towards a smart State? Inter-agency collaboration, information integration, and beyond. *Information Polity*, 17(3–4), 269–280.
- Gil-Garcia, J. R. (2013). *E-Government Success Factors and Measures: Theories, Concepts, and Methodologies: Theories, Concepts, and Methodologies*. IGI Global.
- Gil-Garcia, J. R., & Martinez-Moyano, I. J. (2007). Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government Information Quarterly*, 24(2), 266–290.
- Gil-Garcia, J. R., & Miranda, F. G. (2010). E-government and opportunities for participation: The case of the Mexican state web portals. In *Politics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery* (pp. 56–74). IGI Global.
- Golembiewski, R. T. (1977). A critique of “democratic administration” and its supporting ideation. *American Political Science Review*, 71(4), 1488–1507.

- Gorry, G. A., & Scott Morton, M. S. (1971). *A framework for management information systems*.
- Heeks, R. (2001). *Reinventing government in the information age: International practice in IT-enabled public sector reform* (Vol. 1). Psychology Press.
- Heller, H. (2011). MARXIST PERSPECTIVES. In *The Birth of Capitalism* (pp. 176–214). Pluto Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt183p671.10>
- Henry, N. (1975). Paradigms of public administration. *Public Administration Review*, 378–386.
- Herbert A. Simon. (1947). "Administrative Behavior: A Study of Decision-making Processes." Macmillan.
- Hollands, R. G. (2020). Will the real smart city please stand up?: Intelligent, progressive or entrepreneurial? In *The Routledge companion to smart cities* (pp. 179–199). Routledge.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Hood, C. (2007). Intellectual obsolescence and intellectual makeovers: Reflections on the tools of government after two decades. *Governance*, 20(1), 127–144.
- International Finance Corporation. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition*. Otoritas Jasa Keuangan, 1(7).
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). *Balanced scorecard*. Springer.
- Kemenperin. (2018). *Making Indonesia 4.0*.
- Kettl, D. F. (2015). *The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century*. Jhu Press.
- Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. *The Un of Chicago Press*, 2, 90.
- Kuhn, T. S. (1993). *The Structure of Scientific Revolution*, terjemahan Tjun Sujarman. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kurzweil, R. (2014). *The singularity is near*. Springer.
- Latonero, M. (2018). *Governing artificial intelligence: Upholding human rights & dignity*.
- Latour, B. (2007). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oup Oxford.

- Lazer, D., & Radford, J. (2017). Annual Review of Sociology Data ex Machina: Introduction to Big Data. *The Annual Review of Sociology Is Online At*, 43, 19–39. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116>
- Lévy, P. (1997). *Collective intelligence: Mankind's emerging world in cyberspace*. Perseus books.
- Liberalization, M. I., & Feiteng, Z. (2008). *Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University*.
- Litchfield, E. H. (1956). Notes on a general theory of administration. *Administrative Science Quarterly*, 3–29.
- Malatji, M. (2023). Management of enterprise cyber security: A review of ISO/IEC 27001: 2022. *2023 International Conference On Cyber Management And Engineering (CyMaEn)*, 117–122.
- Manovich, L. (2002). *The language of new media*. University of Toronto Press.
- Margetts, H. (2008). Public management change and e-government: The emergence of digital-era governance. In *Routledge handbook of Internet politics* (pp. 114–127). Routledge.
- Mayer-Schönberger, V. (2010). Beyond Privacy, Beyond Rights – Toward a "Systems" Theory of Information Governance. *California Law Review*, 1853–1885.
- Mayer-Schönberger, V., & Lazer, D. (2007). *Governance and information technology: From electronic government to information government*. MIT Press.
- McCarthy, C., & Harnett, K. (2014). *National institute of standards and technology (nist) cybersecurity risk management framework applied to modern vehicles*. United States. National Highway Traffic Safety Administration.
- McLuhan, M. (1994). *Understanding media: The extensions of man*. MIT press.
- Negroponte, N. (1996). (1995). *Being Digital*. Knopf.
- Negroponte, N., Harrington, R., McKay, S. R., & Christian, W. (1997). Being Digital. *Computer in Physics*, 11(3), 261–262. <https://doi.org/10.1063/1.4822554>
- Nissenbaum, H. (2009). Privacy in context. In *Privacy in Context*. Stanford University Press.



- Noble, D. (2017). *Forces of production: A social history of industrial automation*. Routledge.
- Noveck, B. S. (2015). *Smart citizens, smarter state: The technologies of expertise and the future of governing*. Harvard University Press.
- OECD. (2010). Denmark, Efficient E-government for Smarter Public Service Delivery. *OECD E-Government Studies*.
- OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015. In *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015*. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- OECD. (2020). *Digital Government Index: 2019 results*.
- Osborne, D. (1993). Reinventing government. *Public Productivity & Management Review*, 349–356.
- Oxford University Press. (2015). *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (10th ed.). Oxford University Press.
- Polii, E. H., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. (2021). Evaluation of Governance Implementation Minahasa Regency Drinking Water Company. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(06). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i6-25>
- Riggs, F. W. (1998). Public administration theory a futurist vision. *International Journal of Public Administration*, 21(12), 1667–1757.
- Ritzer, G. (1981). Paradigm analysis in sociology: Clarifying the issues. *American Sociological Review*, 46(2), 245–248.
- Roberts, P., & Sutch, P. (2015). The global commons and international distributive justice. In *Distributive Justice Debates in Political and Social Thought* (pp. 230–250). Routledge.
- Rogers, D. L. (2016). *The digital transformation playbook: Rethink your business for the digital age*. Columbia University Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations*. NY. NY. Free Press, A division of Simon and Schuster, Inc.
- Sandoval-Almazán, R., Luna-Reyes, L. F., Luna-Reyes, D. E., Gil-Garcia, J. R., Puron-Cid, G., & Picazo-Vela, S. (2017). Building digital government strategies. *Public Administration and Information Technology*, 16.

- Schick, A. (1996). *The spirit of reform. Report Prepared for the State Services Commission and the Treasury, New Zealand.*
- Schneider, S. (2019). The Impacts of Digital Technologies on Innovating for Sustainability. In *Palgrave Studies in Sustainable Business in Association with Future Earth* (pp. 415–433). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-97385-2\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-319-97385-2_22)
- Schneier, B. (2015). *Secrets and lies: digital security in a networked world.* John Wiley & Sons.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution.* Currency.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy.*
- Tapscott, D. (1999). The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. *Innovation Journal*, 19(5).
- Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management.* Harper & Brothers, New York.
- Taylor, F. W. (2004). *Scientific management.* Routledge.
- Trist, E., & Emery, F. (2005). Socio-technical systems theory. *Organizational Behavior 2: Essential Theories of Process and Structure*, 169.
- Turkle, S. (2006). Always-on/always-on-you: The tethered self. *Handbook of Mobile Communication Studies.*
- UNDP. (1997). The Concept & Theories of Governance. *United Nations Development Programme*, 106(32).
- United Nations. (2018). Gearing E-Government to Support Transformation towards Sustainable and Resilient Societies. In *United Nations e-Government Survey 2018.*
- United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022.* <https://publicadministration.un.org/en/>
- Waldo, D. (1953). Ideas and issues in public administration: A book of readings. (*No Title*).
- Weber, M. (2009). *The theory of social and economic organization.* Simon and Schuster.
- Weill, P., & Ross, J. W. (2004). *IT governance: How top performers manage IT decision rights for superior results.* Harvard Business Press.

- West, D. M. (2005). *Digital government: Technology and public sector performance*. Princeton University Press.
- Westin, A. F. (1968). Privacy and freedom. *Washington and Lee Law Review*, 25(1), 166.
- Westin, A. F. (2003). Social and political dimensions of privacy. *Journal of Social Issues*, 59(2), 431–453.
- Wilson, W. (1887). June. The study of administration. *Political Science Quarterly*, 2.
- World Bank. (1994). Governance: The World Bank's experience. In *World Bank*.
- World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank Publications.

## TENTANG PENULIS

### **Polii Einjelheart Hansiden**



Lulusan S2 Administrasi Publik di Universitas Negeri Manado, kini mengajar di program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unima sejak 2021, meneliti berbagai penelitian dan pengabdian di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Penulis Buku: *Governansi Digital: Tantangan dan Peluang untuk masa depan pemerintahan*, Anggota Indonesian Association for Public Administration, Sekjen GAK-LPT Sulut yg berjuang bersama mengedukasi mahasiswa anti korupsi di era Digital Society 5.0



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023125607, 6 Desember 2023

**Pencipta**  
Nama : **Polii Einjelheart Hansiden**  
Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Tondano Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, 95618  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Polii Einjelheart Hansiden**  
Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Tondano Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara 95618  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Governansi Digital: Paradigma Baru Administrasi Publik**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 November 2023, di Purbalingga  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.  
Nomor pencatatan : 000558562

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.